

Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Kasus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

Sifa Fauziah¹, Edelweiss Ceciliany², Nabila Citra³, Safa Kinarya Sagita⁴, Aryanto Nur⁵

¹⁻⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika

E-mail : 63230971@bsi.ac.id, 63231004@bsi.ac.id, 63230798@bsi.ac.id, 63230969@bsi.ac.id

Article Info

Article history:

Received 27/10/2025

Revised 27/10/2025

Accepted 28/10/2025

Abstract

This study aims to analyze in depth the implementation of management accounting and its impact on financial performance at the Department of Cooperatives and Micro Enterprises (DKUM) of Depok City. Management accounting plays a vital role in enhancing effectiveness, efficiency, and accountability in public financial management, especially within local government institutions that emphasize transparency and responsibility in budget utilization. The study employs a descriptive qualitative method with a case study approach, using data obtained from financial reports and the 2024 Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP). The results show that the implementation of management accounting at DKUM Depok City has been relatively effective, as indicated by a budget realization rate of 92.72% and an increase in SAKIP scores from 70.85 to 71.05. These improvements reflect better efficiency, effectiveness, and transparency in regional financial management. However, several challenges were identified, including limited skilled human resources and suboptimal integration of financial information systems across departments. Despite these limitations, the structured application of management accounting has proven to support planning, controlling, and evaluating performance-based budgeting. Moreover, it strengthens internal control, enhances budget discipline, and upholds the value-for-money principle, contributing to better governance and improved public service quality within the local government context.

Keywords: *Management Accounting, DKUM, Financial Performance, Accountability, Public Sector*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok. Akuntansi manajemen memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, terutama dalam instansi pemerintah daerah yang menuntut transparansi dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui laporan keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen di DKUM Kota Depok telah berjalan cukup optimal, ditunjukkan dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 92,72% serta peningkatan nilai SAKIP dari 70,85 menjadi 71,05. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, penelitian juga menemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan belum optimalnya integrasi sistem informasi keuangan antar bidang. Walaupun terdapat hambatan tersebut, penerapan sistem akuntansi manajemen yang terstruktur terbukti kemudian mampu membantu proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi anggaran berbasis kinerja. Selain itu, akuntansi manajemen juga memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran, serta mendukung prinsip value for money dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Kata Kunci: Akuntansi manajemen, DKUM, Kinerja keuangan, Efisiensi anggaran, Akuntabilitas publik.



PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketidakstabilan dan disparitas yang cukup signifikan antar daerah, terutama dalam hal ketergantungan terhadap dana transfer pusat, rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta masalah efektivitas dan efisiensi belanja publik. Akibatnya, banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, tuntutan agar pemerintah daerah mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil semakin meningkat, seiring dengan ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan. Di sisi lain, regulasi terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menuntut adanya penguatan sistem manajemen keuangan, termasuk penerapan akuntansi manajemen yang efektif (Hijrianti et al., 2025)

Penerapan akuntansi manajemen di instansi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Melalui sistem akuntansi manajemen, proses perencanaan, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur, sehingga membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat (Santoso et al., 2024). Selain itu, akuntansi manajemen juga berfungsi dalam perencanaan strategi, penyediaan informasi biaya, penilaian investasi, penyusunan anggaran, penetapan tarif pelayanan, serta penilaian kinerja organisasi (Hantono et al., 2021).

Koperasi secara legal tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang anggotanya adalah orang perseorangan atau badan hukum lainnya, dengan dasar kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas prinsip kekeluargaan.". Definisi ini menekankan bahwa koperasi bukan sekedar entitas ekonomi, tetapi juga sebuah social yang bertujuan membangun solidaritas dan keadilan social ditengan masyarakat. Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Ia lahir dari kebutuhan kolektif untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil yang selama ini sering terpinggirkan dalam system ekonomi kapitalistik. Melalui koperasi, para anggotanya dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pasar, dan pelatihan yang sulit diakses secara individu.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan pekerjaan, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan. UMKM dijalankan oleh individu atau kelompok dengan ukuran kecil hingga menengah, baik dari segi modal, pendapatan, maupun jumlah karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha pribadi. Syarat usaha mikro termasuk nilai aset bersih maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau pendapatan tahunan maksimal Rp 300 juta.

Penelitian oleh Gyamera et. al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan layanan akuntansi manajemen dapat meningkatkan hasil keuangan UMKM secara signifikan. Namun studi Yla-Kujala dan tim tahun 2023 menemukan bahwa sekitar 78% usaha kecil mengalami kesulitan dalam menerapkan akuntansi manajemen. Oleh karena itu, kajian skoping menjadi penting untuk memahami seberapa besar pengaruh akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan UMKM dan metode identifikasi serta hasil penelitian di berbagai daerah. Selain itu, review skoping juga bertujuan untuk membuat peta literatur yang menunjukkan perbedaan dan ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan arahan untuk penelitian selanjutnya, termasuk penelitian tentang peran teknologi informasi dalam mendukung akuntansi manajemen. Dengan demikian, tinjauan skoping ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis dan empiris, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi para pelaku usaha dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM melalui penerapan akuntansi manajemen (Kholidah et al., 2025).

Budi N (2023) menyatakan bahwa penerapan akuntansi manajemen, terutama dalam sistem penganggaran, pengukuran kinerja, dan akuntansi manajemen strategis, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di kawasan JABODETABEK, Indonesia. Dari 185 kuesioner yang terkumpul, analisis menggunakan metode Partial Least Squares (PLS) menunjukkan bahwa literasi teknologi dan ketersediaan sumber daya keuangan dapat memperkuat hubungan antara praktik akuntansi

dan kinerja usaha. Meskipun demikian, pada kenyataannya, kedua variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini menandakan bahwa UMKM masih menghadapi hambatan dalam memanfaatkan teknologi dan sumber daya keuangan untuk meningkatkan kinerja mereka (Kholidah et al., 2025).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memiliki peran strategis sebagai instansi yang mengelola dan memberdayakan usaha mikro sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi di wilayahnya. Walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pengelolaan, praktik manajemen keuangan di dinas ini belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi manajemen menjadi krusial dalam membantu manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik (Gustami et al., 2024). Melalui penerapan akuntansi manajemen yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat terukur kinerjanya, memiliki dasar pengambilan keputusan yang rasional, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan instansi.

Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian *value for money* dalam pengelolaan anggaran publik. Beberapa di antaranya meliputi efektivitas penggunaan anggaran yang belum optimal karena tumpang tindih kegiatan, kurangnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta pengukuran kinerja yang masih berfokus pada output kuantitatif tanpa mempertimbangkan outcome program. Tantangan lain muncul dalam penerapan prinsip efisiensi dan ekonomi akibat keterbatasan integrasi data biaya program, sehingga pengendalian anggaran sering dilakukan setelah pembelanjaan terjadi (Diva et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun regulasi dan kebijakan sudah tersedia, implementasi akuntansi manajemen serta sistem pengendalian intern masih perlu diperkuat agar pengelolaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Penerapan akuntansi manajemen terbukti relevan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Dalam konteks akuntansi manajemen, sistem pelaporan yang transparan dan berbasis akuntabilitas dinilai memperkuat fungsi pengendalian dan perbaikan kinerja lembaga (Qisthy et al., 2025). Dengan sistem akuntansi manajemen yang baik, pemerintah daerah dapat menjelaskan secara sistematis penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya, sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, akuntansi manajemen menyediakan informasi yang jelas dan terukur untuk pengambilan keputusan, yang memudahkan evaluasi kinerja keuangan secara lebih akurat, sehingga tercapai efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen di level UMKM masih belum optimal, khususnya dalam pengendalian biaya, penyusunan anggaran, dan pemanfaatan informasi manajerial (Rani et al., 2023). Sementara itu, studi yang lain menemukan bahwa akuntabilitas daerah, besaran belanja, dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun peningkatan belanja tidak selalu diikuti perbaikan kinerja akibat lemahnya efisiensi dan efektivitas anggaran (Destiani et al., 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, unit kerja yang membina UMKM dan koperasi dengan mengintegrasikan analisis penerapan akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris baru, mengingat masih minimnya kajian yang membahas keterkaitan kedua aspek tersebut secara mendalam pada tingkat dinas yang berperan strategis dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya di wilayah perkotaan seperti Depok.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang berkaitan dengan penerapan akuntansi manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Pertama, bagaimana penerapan akuntansi manajemen dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024, meliputi proses perencanaan, pengendalian, serta pelaporan keuangan?. Kedua, apa saja kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam penerapan akuntansi manajemen di lingkungan Dinas, serta bagaimana solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan instansi?. Ketiga, sejauh mana penerapan akuntansi manajemen berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil?.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, serta mengevaluasi pengaruh penerapan akuntansi manajemen terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan dinas tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi kendala maupun peluang yang muncul dalam penerapan akuntansi manajemen, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat penerapan akuntansi manajemen sehingga mendukung kinerja keuangan dinas yang berorientasi pada prinsip *value for money*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena penerapan akuntansi manajemen secara sistematis, faktual, dan mendalam berdasarkan data yang tersedia (Sugiyono, 2023). Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami secara komprehensif konteks dan dinamika penerapan akuntansi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran publik.

Objek penelitian adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro serta penguatan kelembagaan koperasi di tingkat daerah. Menurut Afkar (2025), objek dalam penelitian kualitatif dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena tertentu yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran publik di lingkungan DKUM Kota Depok.

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai dokumen resmi dinas seperti laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Sesuai pendapat (Sugiyono, 2022) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dan studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik akuntansi manajemen, mekanisme penganggaran, serta pencapaian kinerja keuangan di DKUM.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menelaah, dan menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntansi manajemen diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menilai sejauh mana penerapan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran publik.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi manajemen di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok diawali melalui proses perencanaan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*). Sistem ini menuntut agar setiap kegiatan dan program memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan dikaitkan langsung dengan sasaran strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok Tahun 2024, DKUM menetapkan indikator seperti jumlah pelatihan wirausaha baru (WUB), peningkatan jumlah koperasi aktif, serta peningkatan daya saing UMKM lokal. Setiap indikator disertai target output dan outcome yang digunakan sebagai dasar perencanaan alokasi anggaran tahunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Selain itu, DKUM menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan bidang-bidang terkait dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta menyesuaikan dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Depok 2021–2026. Hal ini menunjukkan penerapan akuntansi manajemen tidak hanya terbatas pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga mencakup aspek strategis dan koordinatif lintas unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2024, diketahui bahwa realisasi belanja mencapai 92,72% dari anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan cukup efisiensi karena terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), yang berarti pengeluaran belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp 793.400.000 serta persediaan barang senilai Rp 5.596.400. Dari sisi pengawasan, Dinas juga menindaklanjuti hasil review Inspektorat Daerah Kota Depok dan temuan BPK Provinsi Jawa barat, antara lain terkait penghapusan aset yang tidak memiliki fisik serta pembayaran pajak kendaraan dinas yang masih terhutang. Tindak lanjut tersebut

sudah dilakukan melalui surat resmi kepada Dinas Keuangan Daerah dan Wali Kota Depok, yang menunjukkan adanya komitmen dalam menegakkan akuntabilitas keuangan.

Lebih lanjut, berdasarkan tabel Nilai SAKIP Perangkat Daerah se-Kota Depok, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, dinas ini memperoleh nilai sebesar 70,85 dengan kategori BB (Baik), kemudian meningkat menjadi 71,05 pada tahun 2024 dengan kategori yang sama. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja. Kategori BB menandakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memiliki tata kelola kinerja yang baik, namun masih diperlukan penguatan dalam inovasi program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penerapan akuntansi manajemen, perencanaan berbasis kinerja, dan pencapaian output program. Hal tersebut menegaskan bahwa akuntansi manajemen berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung sistem pengendalian dan evaluasi kinerja sektor publik. Dengan demikian, penerapan akuntansi manajemen tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi hasil.

Hasil tersebut menguatkan temuan (Sriyono et al., 2024) bahwa akuntansi sektor publik tidak hanya berfokus pada aspek pengendalian biaya, tetapi juga berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi, transparansi keuangan, serta peningkatan kepercayaan publik melalui penyajian laporan yang akurat, relevan, dan dapat diaudit. Dengan adanya tindak lanjut terhadap hasil audit dan review oleh Inspektorat Daerah maupun BPK Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal telah berjalan secara efektif dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, keberhasilan DKUM dalam melaksanakan program prioritas seperti pengembangan koperasi modern, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM memperkuat bukti bahwa penerapan akuntansi manajemen yang baik berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian output kinerja. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi manajemen berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas publik, dan perencanaan berbasis kinerja di sektor publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Santoso et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi manajemen pada organisasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pencapaian program kerja pemerintah. Hal ini terjadi karena akuntansi manajemen menyediakan informasi yang relevan dan terukur yang dapat digunakan dalam proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja setiap unit kerja. Dengan adanya penerapan sistem tersebut, organisasi publik dapat melakukan penilaian yang lebih objektif terhadap pelaksanaan program, mengidentifikasi kelemahan, serta merancang strategi perbaikan yang berorientasi pada hasil (*performance-based management*). Selain itu, temuan penelitian (Qisthy et al., 2025) turut memperkuat hasil tersebut dengan menekankan pentingnya penerapan pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada tingkat dinas pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana publik, tetapi juga berperan besar dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap satuan kerja dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang berfokus pada hasil dan dampak yang dicapai, bukan sekadar pada jumlah anggaran yang terserap. Dengan demikian, setiap pengeluaran pemerintah dapat diukur kontribusinya terhadap manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, sehingga proses penganggaran menjadi lebih terarah dan berorientasi pada hasil. Integrasi antara penerapan akuntansi manajemen dan penganggaran berbasis kinerja mampu menciptakan landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui sistem ini, para pimpinan instansi publik dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis pada data kinerja yang akurat. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh akses untuk menilai sejauh mana efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya sinergi tersebut, organisasi publik dapat lebih bertanggung jawab, transparan, dan fokus pada pencapaian hasil yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi sebelumnya yang menegaskan bahwa penerapan akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan dan akuntabilitas instansi pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh (Faisal et al., 2025) dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi, yang membuktikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik

dan pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, dengan kontribusi sebesar 68,2% terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Mereka menegaskan bahwa semakin baik kualitas informasi manajerial yang dihasilkan sistem akuntansi, maka semakin efektif pula proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya publik. Kondisi tersebut sejalan dengan praktik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, di mana penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan ketepatan pelaporan keuangan. Melalui sistem ini, aktivitas keuangan dapat dipantau secara *real time*, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan mendukung penerapan *good governance* sebagaimana dijelaskan oleh Faisal et al. (2025). Capaian kinerja DKUM yang meningkat dari 70,85 menjadi 71,05, disertai realisasi anggaran 92,72 %, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan secara efisien dan efektif. Selain itu, penerapan akuntansi manajemen berperan penting dalam mewujudkan prinsip *value for money*, yaitu keseimbangan antara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip ini tercermin pada meningkatnya dukungan fasilitas serta pendampingan bagi pelaku koperasi dan UMKM di Kota Depok yang menjadi fokus utama program DKUM, sehingga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi manajemen tidak hanya berdampak pada efisiensi finansial, tetapi juga pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

Konsistensi temuan ini juga terlihat bila dibandingkan dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Santoso et al., 2024), yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta penggunaan indikator kinerja keuangan yang transparan mampu memperkuat penerapan *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam konteks DKUM Kota Depok, penerapan prinsip tersebut tercermin dari tindak lanjut terhadap temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan upaya perbaikan administrasi aset serta penyelesaian kewajiban pajak. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen nyata dari instansi dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi sistem akuntansi serta kemampuan analisis terhadap data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penerapan akuntansi manajemen tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem yang baik, tetapi juga bergantung pada kompetensi aparatur dan budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip transparansi serta tanggung jawab kinerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hiola & Mahmud, 2024), yang menekankan pentingnya faktor kapasitas SDM dan komitmen organisasi dalam keberhasilan implementasi akuntansi manajemen di sektor publik.

Efisiensi penggunaan anggaran meningkat karena sistem pelaporan berbasis kinerja memungkinkan evaluasi secara real-time terhadap pemanfaatan dana, sehingga belanja yang tidak produktif dapat diminimalkan. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong setiap unit kerja untuk lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan program, karena setiap kegiatan harus disertai indikator hasil yang jelas dan terukur. Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan tidak semata berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, melainkan juga pada pencapaian manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penerapan sistem tersebut turut memperkuat fungsi pengawasan internal, sebab setiap tahapan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja. Transparansi laporan keuangan pun meningkat karena data yang disajikan bersumber dari hasil pengukuran kinerja yang objektif dan dapat diverifikasi. Kondisi ini menjadikan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data (*data-driven decision making*), sekaligus mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan program. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi manajemen berbasis kinerja tidak hanya menghasilkan efisiensi anggaran, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini menunjukkan

bahwa efektivitas kebijakan keuangan daerah dapat tercapai ketika sistem akuntansi mendukung perencanaan strategis serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan akuntansi manajemen di instansi pemerintah daerah, termasuk DKUM Kota Depok, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga memperluas literatur mengenai akuntansi manajemen sektor publik di tingkat pemerintahan daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut, penerapan akuntansi manajemen yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan di DKUM Kota Depok telah bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented management*). Kondisi ini sekaligus menjadi pondasi penting bagi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Akuntansi, jika dilihat dari perspektif proses kegiatannya, dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengelompokan, peringkasan, dan pencatatan data, yang bertujuan menghasilkan informasi yang berguna. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Fauziah, 2020).

Akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen melalui berbagai proses atau kegiatan perusahaan atau organisasi, dengan tujuan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi serta menjalankan berbagai fungsi manajerial. Akuntansi manajemen adalah sistem pelaporan keuangan yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi penting kepada pihak internal perusahaan atau manajemen sebagai dasar dalam membuat keputusan. Informasi yang dihasilkan mencakup berbagai kebijakan internal yang tidak diberitahukan kepada pihak eksternal perusahaan ((Hariyani, 2018) . Akuntansi manajemen (*management accounting*) merupakan proses dalam mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menafsirkan, serta menyampaikan informasi keuangan maupun non keuangan yang bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja.

Sistem akuntansi manajemen merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak internal organisasi, terutama manajemen, dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme formal yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data keuangan dan nonkeuangan yang dapat digunakan oleh manajer guna meningkatkan efektivitas operasional organisasi (Haslindah et al., 2020).

Komponen utama akuntansi manajemen terdiri dari beberapa elemen penting yang berperan dalam membantu manajemen menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja organisasi. diantaranya yaitu:

1. Penganggaran (*budgeting*), yaitu proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Penganggaran digunakan sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan operasional perusahaan agar berjalan sesuai rencana dan efisien dalam penggunaan sumber daya.
2. Akumulasi dan analisis biaya (*cost accounting*) juga merupakan bagian penting dari akuntansi manajemen. Komponen ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menganalisis biaya-biaya yang timbul dalam proses produksi dan operasional. Informasi biaya tersebut digunakan untuk menentukan harga jual produk, menilai efisiensi kegiatan, dan mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran.
3. Pengendalian manajemen (*management control*), yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana strategis. Melalui pengendalian ini, manajer dapat mendeteksi adanya penyimpangan, kemudian mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja (*performance measurement*) dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi unit kerja, proyek, maupun individu dalam

4. Pengambilan keputusan (*decision making*), yaitu penggunaan informasi akuntansi untuk memilih alternatif terbaik dalam kegiatan bisnis. Melalui analisis seperti biaya-volume-laba (CVP), keputusan make or buy, dan analisis investasi, manajemen dapat menentukan strategi yang paling menguntungkan bagi perusahaan
5. Terakhir Sistem informasi akuntansi manajemen (*management accounting information system*) berperan dalam mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan. Sistem ini membantu menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi manajer untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Akuntansi manajemen mencakup berbagai aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks instansi pemerintah, ruang lingkup manajemen tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan publik dijalankan secara efektif dan efisien.

Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dalam mendukung proses manajerial. Akuntansi keuangan berorientasi pada penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan akuntansi manajemen, berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan nonkeuangan bagi pihak internal untuk membantu proses pengambilan keputusan, perencanaan serta pengendalian kegiatan operasional (Sa' et al., 2019). Dengan demikian, akuntansi manajemen bersifat lebih fleksibel dan strategis, karena menyesuaikan kebutuhan informasi yang relevan bagi pimpinan instansi dalam meningkatkan kinerja

Tujuan utama akuntansi manajemen adalah memberikan informasi kepada pihak internal perusahaan, khususnya manajemen, agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial serta menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat (Irnawati et al., 2021). Fungsi utama akuntansi manajemen diantaranya:

1. Manajer Keuangan. Akuntansi manajemen berperan penting dalam menyediakan data yang berkaitan dengan kegiatan keuangan perusahaan. Informasi ini mencakup kebutuhan modal kerja, perhitungan biaya modal (*cost of fund*), tingkat pengembalian investasi dan modal, serta analisis rasio keuangan. Semua informasi tersebut membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan efisiensi keuangan perusahaan.
2. Manajer Produksi, dalam bidang produksi, akuntansi manajemen berfungsi untuk menyajikan data rinci terkait biaya produksi atau harga pokok penjualan (HPP). Informasi yang dihasilkan meliputi total biaya produksi, biaya per unit, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Data tersebut menjadi dasar bagi manajer produksi untuk melakukan pengendalian biaya, meningkatkan efisiensi proses, serta menekan pemborosan dalam kegiatan operasional.
3. Manajer Pemasaran, untuk bagian pemasaran, akuntansi manajemen memberikan informasi mengenai komponen biaya yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk, metode penjualan (tunai atau kredit), biaya promosi, komisi penjualan, serta pemberian diskon. Informasi ini digunakan oleh manajer pemasaran dalam menyusun strategi peningkatan penjualan dan menentukan kebijakan harga yang kompetitif.
4. Pimpinan atau Top Manajemen, bagi pimpinan perusahaan, akuntansi manajemen berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan strategis. Data yang dihasilkan digunakan untuk penyusunan anggaran, perencanaan investasi, perluasan usaha, hingga diversifikasi produk. Dengan adanya informasi akuntansi manajemen, pimpinan dapat menetapkan arah kebijakan dan strategi perusahaan secara lebih tepat dan terukur.

Laporan keuangan koperasi adalah bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja dalam mengelola koperasi, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/1X/2015. Laporan keuangan koperasi adalah bagian dari tanggungjawab manajemen. Laporan ini dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kinerja pengelolaan koperasi, laporan ini

ditunjukkan pihak internal maupun eksternal (Priska Toyo et al., 2024). Menurut Tunggal (1996), kinerja keuangan merupakan hasil atau nilai tambah yang diperoleh, yang dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi pelaksanaan dengan standar atau pelaksanaan yang seharusnya dicapai sesuai kondisi yang berlaku. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui perbedaan antara pelaksanaan aktual dengan yang diharapkan, bahkan dapat dianalisis secara kualitatif apabila memungkinkan (Liow, 2023).

Lebih lanjut, akuntansi manajemen memiliki hubungan erat dengan sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen menjadi dasar dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Melalui sistem ini, instansi bisa menunjukkan sejauh mana sumber daya publik digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip transparansi. Dengan demikian, akuntansi manajemen tidak hanya berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan.

Akuntansi manajemen bisa menjadi alat yang baik untuk membuat keputusan lebih baik dan meningkatkan efisiensi, menurut Zhang (2022). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen modern bisa memengaruhi performa organisasi, meskipun dalam penelitian ini, pengaruh jarak kekuasaan tidak terlalu signifikan. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi manajemen membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis di kalangan usaha kecil menengah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sistem anggaran, sistem penilaian kinerja, dan akuntansi manajemen strategis memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan UMKM. Selain itu, penelitian tersebut juga memperkuat pentingnya praktik akuntansi manajemen dalam meningkatkan kinerja finansial maupun non-finansial UMKM, seperti yang ditulis oleh Kholidah et al., 2025.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Penerapan Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok”, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi manajemen di instansi tersebut sudah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil analisis laporan keuangan tahun 2024, dimana realisasi belanja mencapai 92.72% dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dan pengendalian biaya yang cukup baik.

Penerapan akuntansi manajemen juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program, sebagaimana tergambar dalam capaian kinerja instansi yang mendekati target penuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan berbasis kinerja dan pengendalian anggaran yang diterapkan telah berjalan secara baik, sehingga anggaran tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga mampu mendukung keberhasilan program prioritas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan aset dan penyempurnaan administrasi keuangan, secara keseluruhan penerapan akuntansi manajemen telah memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa mendatang.

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa penerapan akuntansi manajemen yang baik dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola keuangan secara lebih efisien dan transparan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk terus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntansi manajemen, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arianto Nur, S.E, M.M, selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Dukungan beliau sangat membantu dalam penyempurnaan isi dan arahan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan selama proses penelitian hingga tersusunya jurnal penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Destiani, E., Dirgantari, N., Amir, & Pramono, H. (2025). Faktor Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah 2019-2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9.
- [2] Diva, V., Siboro, S. F., Ambarani, A., & Yudianti, A. (2024). Analisis Value for Money terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.534>
- [3] Faisal, Ardian, Sabarniati, & Eriva, C. Y. (2025). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(1). Diakses pada: <https://jurnal.politeknikaceh.ac.id/index.php/jia/article/view/332>
- [4] Fauziah, F. (2020). *Pengantar Dasar Akuntansi - Teknik dan Konsep Penyusunan Laporan Keuangan* (Buku 1). Muhammadiyah University Press. Diakses pada: https://minio.umkt.ac.id/simpelv2-media/karya/buku/ff230/e-Book_Pengantar_Dasar_Akuntansi_Buku_1_141220_1.pdf
- [5] Gustami, K. P., Fransisco, S., Rachmawati, F. A., & Nur, B. F. (2024). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2019-2022. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 50–59. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3782>
- [6] Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiastara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). Akuntansi Manajemen Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Vol. 21). Media Sains Indonesia. Diakses pada: http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku%20Digital%20-%20AKUNTANSI%20SEKTOR%20PUBLIK_compressed.pdf
- [7] Hariyani, D. S. (2018). *Akuntansi Manajemen - Teori dan Aplikasi*. Aditya Media Publishing. Diakses pada: https://pics.unipma.ac.id/content/pengumuman/03102_04_03_2019_01_17_07Buku%20Akuntansi%20Manajemen.pdf
- [8] Haslindah, Kamase, J., & Hajering. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2.
- [9] Hijrianti, Z. L. S., Winarni, D., Amir, A., & Pramono, H. (2025). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2408–2423. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5953>
- [10] Hiola, Y., & Mahmud, A. D. (2024). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(1). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- [11] Inawati, J., Agustina, P. A. A., Sembiring, L. D., Cahyanigtyas, F., Mahputera, Amar, S. S., Andarsari, P. R., Manuari, I. A. R., Yusran, M., & Ayuandini, W. (2021). *Akuntansi Manajemen*. Media Sains Indonesia. Diakses pada: <https://repository.stiesultanagung.ac.id/id/eprint/450/1/Buku%20Digital%20-%20AKUNTANSI%20MANAJEMEN.pdf>
- [12] Liow, F. E. R. I. (2023). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Diakses pada: https://itmtomohon.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/18_Festus-Liow_Buku-Referensi-Kinerja-Kuangan-Perusahaan-1.pdf
- [13] Kholidah, N. D., Yulani, F. S., Handayati, P., & Makaryanawati. (2025). Peran Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja UMKM. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(1), 50–68. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2505>
- [14] Priska Toyo, F., Niken Aurelia, P., & Patty, T. F. Q. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Menurut SAK ETAP Pada Koperasi Suro Pudi Koting. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2). <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i2.11305>
- [15] Qisthy, N. A., Putri, V. S., Hairinisah, S., & Meidiyustiani, R. (2025). Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara. *Discoveries in Economics and Accounting Studies*, 1(1), 9–12.
- [16] Rani, A., Saleh, A. M., & Rukmana, R. (2023). Penggunaan Praktik Akuntansi Manajemen pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Kabupaten Gowa (Studi Kasus UMKM Roti Nakku). *Tangible Journal*, 8(2), 192–199. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.429>
- [17] Sa', A., Siddik, M., Si, N. H., Ningsih, M. S., Kurnia, K., Hari, S. E., & Si, M. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Diakses pada: <https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23561/1/BUKU%20AKUNTANSI%20MANAJEMEN.pdf>
- [18] Santoso, R., Sulisnaningrum, E., Stie, J., Negara, T., & Malang, I. (2024). Implementation of Good Governance in Public Sector Accounting: Evaluation of Effectiveness in Local Government. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 15(1). <https://doi.org/10.54204/TAJI/Vol152024011>
- [19] Sriyono, Effendi, M. I., & Sirait, A. (2024). The Practice Of Strategic Management Accounting In Public Sector Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 21–39. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i1.1675>
- [20] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, CV. Diakses pada: https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf